



Efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis Dalam Penggunaan Dana Bantuan Untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis

Ergun Alfauzi

Universitas Galuh

Aan Anwar Sihabudin

Universitas Galuh

Arie Budiawan

Universitas Galuh

Alamat: Jln. RE Matadinata No 150 Ciamis Fisip Universitas Galuh

Korespondensi penulis: ergunalfauzi@student.unigal.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the suboptimal effectiveness of the Ciamis Kesbangpol Agency in utilizing financial aid funds for political parties in Ciamis Regency. The main issues include the absence of a digital system for administration and reporting, limited funding that affects the achievement of political education goals and party secretariat operations, and weak oversight mechanisms. This study employs a qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation involving six informants from Kesbangpol officials and political party representatives. The findings show that out of eight effectiveness indicators, only three are functioning well, while the remaining five are still suboptimal. The obstacles identified include budget limitations, a centralized monitoring system, lack of digital infrastructure, inadequate work facilities, and insufficient socialization efforts. Efforts to address these issues include cross-sector collaboration, proposals for digital systems, facility improvements, periodic evaluations, and encouraging youth participation. Therefore, the effectiveness of the financial aid fund utilization by Kesbangpol Ciamis remains less than optimal, although various improvement efforts have been initiated for better performance in the future.*

Keywords: *Effectiveness; Kesbangpol; Financial Aid Funds; Political Parties.*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis Dalam Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis, belum optimal. Masalah utama yaitu mencakup belum tersedianya sistem digital untuk administrasi dan pelaporan, terbatasnya dana bantuan yang berdampak pada rendahnya pencapaian tujuan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai, serta lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan 6 informan dari aparat Kesbangpol dan partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 indikator efektivitas, hanya 3 indikator yang berjalan baik, sementara 5 indikator belum optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, sistem pengawasan satu pintu, belum adanya sistem digital, keterbatasan fasilitas kerja, serta sosialisasi yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan yaitu melalui kerjasama lintas sektor, pengajuan sistem digital, peningkatan fasilitas, evaluasi berkala, dan partisipasi dari generasi muda. Dengan demikian, efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan oleh Badan Kesbangpol Ciamis masih belum optimal, namun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kata kunci: *Efektivitas; Kesbangpol; Dana Bantuan Keuangan; Partai Politik.*

LATAR BELAKANG

Partai politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang berperan sebagai wadah aspirasi dan representasi kepentingan masyarakat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sistem di mana partai politik memiliki peran sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah (Sinaga, 2017). Selain memiliki peran penting,

partai politik juga memiliki fungsi yang cukup penting, hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat (1) yaitu :Partai Politik berfungsi sebagai sarana :Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Tangkere et al., 2021).

Untuk mendukung fungsi dan peran partai politik, pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, atau yang diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Salah satu sumber pendanaan yang penting bagi partai politik adalah dana bantuan keuangan yang disalurkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dana ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan partai politik, termasuk pendidikan politik, kampanye, dan penguatan kapasitas organisasi. Pengelolaan dana bantuan partai politik memerlukan mekanisme yang akuntabel dan transparan mengingat dana tersebut bersumber dari APBD. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari tiga sumber yaitu : Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan; bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tangkere et al., 2021)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai leading sector yang menangani urusan politik dalam negeri memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan bantuan keuangan partai politik. Di Kabupaten Ciamis, Kesbangpol berperan penting dalam memastikan efektivitas penggunaan dana bantuan tersebut sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan seperti yang diungkapkan oleh Emitai Etzioni

(1982:54) dalam (Julianto & Agnanditiya Carnarez, 2021) Mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.”

Menurut data yang diambil dari (kesbangpol.bantenprov.go.id : Oktober 2021) salah satu sumber dana partai politik, yaitu bantuan keuangan dari APBN/APBD yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020. Demikian pula peraturan atau regulasi pemberian bantuan keuangan pada partai politik ini yang dijelaskan di permendagri. Berdasarkan latar belakang di atas, sejauh ini menurut hasil observasi dari peneliti terlihat bahwa Efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis Dalam Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis, belum efektif atau belum berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa masalah. Hal ini, didukung dengan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa indikator masalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sistem digital atau platform online dalam pengelolaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban sehingga menghambat efektivitas dalam proses pengajuan juga pelaporan.
2. Terbatasnya dana bantuan keuangan bagi partai politik yang berdampak pada tidak optimalnya pencapaian tujuan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
3. Belum optimalnya pengawasan dalam penggunaan dana bantuan untuk partai politik yang berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi mencapai tujuan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan menjaga kualitas hubungan antar komponennya. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk

menganalisis efektivitas organisasi adalah teori dari Mardiasmo dalam (Endrawati, 2023:10) Menurut Mardiasmo, keberhasilan atau kegagalan Efektivitas dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: Pencapaian target, Kemampuan adaptasi (fleksibelis), Kepuasan Kerja, dan Tanggung jawab.

1. Pencapaian Target

Maksud pencapaian target disini dapat diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kemampuan Adaptasi (fleksibelis)

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam organisasi maupun luar organisasi.

3. Kepuasan Kerja

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan/sistem intensif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.

4. Tanggung jawab

Organisasi dapat melaksanakan anggota yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan menggambarkan kondisi obyek yang alamiah di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Efektivitas Kesbangpol Ciamis Dalam Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis secara rinci, mendalam, dan tuntas. Seperti menurut pendapat Sugiono (2018:9) bahwa: “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Staf bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Perencana Ahli Muda, Partai politik. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan kebijakan di lapangan, sementara dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, dan arsip yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan a). reduksi data b). penyajian data c). Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Efektivitas Kesbangpol Ciamis Dalam Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas kesbangpol dalam penggunaan dana bantuan keuangan untuk partai politik menunjukkan adanya pelaksanaan yang berlangsung secara aktif dan berkesinambungan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi langsung dan wawancara dengan narasumber kunci, implementasi kebijakan ini dianalisis menggunakan teori efektivitas Mardiasmo yang mencakup empat variabel utama: pencapaian target, kemampuan adaptasi (fleksibilitas), kepuasan kerja dan tanggung jawab.

Dalam aspek pencapaian target, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Ciamis masih belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana bantuan bagi partai politik, yang berdampak pada sempitnya cakupan dan rendahnya intensitas kegiatan yang dapat dilakukan. Akibatnya, sasaran utama pendidikan politik seperti melahirkan kader partai yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, belum dapat tercapai secara maksimal. Disamping itu Badan Kesbangpol telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang berpengaruh terhadap sejauh mana kegiatan pendidikan politik yang dibiayai dengan dana bantuan benar-benar dilaksanakan dan tepat sasaran untuk memastikan bahwa tujuan utama dari penyaluran dana, yakni peningkatan

pendidikan politik, benar-benar tercapai secara optimal. Namun, dalam praktiknya pengawasan monitoring dan evaluasi tersebut masih bersifat satu pintu dimana mekanisme atau sistem pengawasan yang terpusat hanya pada satu lembaga atau pihak tertentu, tanpa adanya pelibatan atau keterlibatan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal yang dapat berpotensi terjadinya kerjasama terselubung.

Dalam aspek kemampuan adaptasi (fleksibilitas), hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perbuan regulasi Badan Kesbangpol Ciamis cukup responsif terhadap regulasi baru. Meskipun belum terjadi perubahan regulasi, para pihak telah menunjukkan kesiapan dalam menyesuaikan prosedur apabila terdapat peraturan baru. Proses perubahan regulasi biasanya diawali dengan rapat koordinasi dan pemberitahuan awal, dan apabila regulasi baru ditetapkan, penyampaian informasi dilakukan secara cepat melalui pengiriman dokumen resmi dan kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Namun, adaptasi tersebut belum diringi perkembangan teknologi khususnya dalam hal implementasi sistem digital dalam administrasi dan pelaporan dana bantuan partai politik, masih belum sepenuhnya terealisasi. Sebagian besar proses pengajuan dan pelaporan masih dilakukan secara manual atau offline, yang lambat dan rawan kesalahan karena masih bergantung pada dokumen fisik. Hal ini berpengaruh pada efektivitas administrasi dan pelaporan penyaluran dana bantuan partai politik.

Dalam aspek kepuasan kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana bantuan untuk partai politik, pihak Kesbangpol Ciamis telah memiliki prosedur kerja dan standar operasional (SOP) yang jelas dan dijalankan secara konsisten sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan ini menunjukkan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, koordinasi antara Kesbangpol dan partai politik juga berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa alur koordinasi yang diterapkan telah berjalan secara efektif dan efisien, bahkan didukung oleh kemudahan teknologi komunikasi saat ini. Namun, masih terdapat ketidakpuasan dari sebagian aparatur terhadap kondisi lingkungan kerja, khususnya terkait keterbatasan fasilitas yang tersedia. Fasilitas kerja yang kurang memadai dinilai menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana bantuan partai politik, sehingga diperlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung kerja di lingkungan Badan Kesbangpol Ciamis.

Dalam aspek tanggung jawab, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan partai politik di Kesbangpol Ciamis tercermin melalui ketelitian dalam proses verifikasi dokumen dan ketaatan terhadap prosedur pencairan dana. Setiap dokumen yang diajukan diverifikasi secara cermat untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dana bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan efektivitas keseluruhan kegiatan pendidikan politik. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan terhadap partai politik dalam pengelolaan dana bantuan masih belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya partisipasi dari generasi muda dalam kegiatan politik, yang secara tidak langsung turut memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan politik di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong keterlibatan aktif dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda, dalam proses pendidikan politik yang dibiayai oleh dana bantuan tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis dalam penggunaan dana bantuan untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis, yaitu terbatasnya dana bantuan, pengawasan yang masih bersifat satu pintu, belum tersedianya sistem digital dalam proses pengajuan dan pelaporan, fasilitas kerja yang masih terbatas, kegiatan sosialisasi (bimtek) yang belum berjalan optimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis dalam penggunaan dana bantuan untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai sektor swasta, melibatkan berbagai dalam proses monitoring dan evaluasi, mengajukan pengadaan sistem digital ke dalam proses pengajuan dan pelaporan, meningkatkan atau perbaikan fasilitas kerja, meningkatkan partisipasi lebih aktif dari generasi muda.

Meski penyaluran dan pengelolaan administrasi dana dilaksanakan secara prosedural dan berkelanjutan, efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kepuasan kerja pegawai, minimnya inovasi digital dalam tata kelola, dan sosialisasi serta pendampingan partai politik yang belum optimal; oleh karenanya, meskipun kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam hal pencapaian output, efektivitas jangka panjangnya perlu diperkuat melalui peningkatan fasilitas, digitalisasi proses,

pelembagaan evaluasi, dan pelibatan lebih aktif dari berbagai pihak untuk menunjang akuntabilitas dan kinerja organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis dalam penggunaan dana bantuan untuk partai politik di Kabupaten Ciamis masih belum berjalan secara optimal. Dari 4 dimensi dan 8 indikator yang dijadikan alat ukur, hanya 3 indikator yang menunjukkan hasil optimal, yaitu responsivitas terhadap regulasi, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta akuntabilitas pengelolaan dana. Sementara itu, 5 indikator lainnya, yakni pencapaian pendidikan politik, pelaksanaan pengawasan berkala, penyesuaian dengan perkembangan teknologi, lingkungan kerja yang mendukung, serta pembinaan dan pendampingan, masih belum terlaksana secara maksimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan dana bantuan, lemahnya sistem pengawasan yang masih bersifat satu pintu, belum adanya sistem digital untuk pengajuan dan pelaporan, fasilitas kerja yang belum memadai, serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol Ciamis perlu mengembangkan kerja sama lintas sektor untuk mendukung pendanaan dan pengawasan, mempercepat implementasi sistem digital dalam proses administrasi dan pelaporan, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas sarana kerja dan efektivitas kegiatan sosialisasi dengan mendorong keterlibatan generasi muda dalam proses pendidikan politik dan pengelolaan bantuan keuangan partai. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan dapat meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Erdina, T. V., & Hariani, D. (2017). Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3). <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Julianto, B., & Agnanditiya Carnarez, T. Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

- Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Nabila, K. K., Huda, M. M., & Kasiemi, S. (2024). Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues*, 6(1), 46–58. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211>
- Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten barito selatan. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82–90. <https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1781>
- Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*, 2(1), 39–59. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i1.914>
- Saadah, M. (2022). Efektivitas Bantuan Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Partai Politik Di Provinsi Jambi. *Journal Publicuho*, 5(1), 63–72. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.23744>
- Sinaga, D. P. (2017). Akuntabilitas Dana Bantuan Kevangan Partai Politik (Stuaii Pada Partai Politik di Salatiga) [Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26835>
- SUHARDI, M. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Diversitas Terhadap Efektivitas Organisasi. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(2), 120–127. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v3i2.2304>
- Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2021). Efektifitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politikdalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik. *Jurnal Transdisiplin Pertanian*, 17(3), 995–1006.

Buku Teks

- Endrawati. (2023). Manajemen dan Organisasi. In STIE Muahammadiyah Jakarta (Issue 2016051788). <http://vini.stiemj.ac.id/wp-content/uploads/makalah-Manajemen-Organisasi-converted.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 ayat 1
- Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik. diambil dari (kesbangpol.bantenprov.go.id : Oktober 2021)